



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BALANGAN**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Cascading Kinerja .....	4
E. Gambaran Umum SOPD.....	5
F. Isu - Isu Strategis .....	8
G. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	8
H. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022 .....	12
I. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Renstra SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan) .....	15
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
C. Renja SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan) .....	18
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD (2021 – 2026).....	25
E. Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Berdasarkan (RPJMD 2021 – 2026).....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja .....	29
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	43
C. Kinerja Lainnya.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Tindak Lanjut .....	51
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) Sasaran, dan 2 (dua) Indikator Sasaran yang harus di laksanakan. Dari sasaran yang sudah di tetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dapat di ikhtisarkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi. Hasil capaian kinerja di atas akan di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dan sebagai bahan masukan kepada seluruh bidang dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan agar lebih baik lagi pada tahun mendatang, adapun penjelasan umum dari data yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
2	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	100%

Capaian indikator kinerja tersebut di peroleh :

1. Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{20} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum (n-1)} - \text{Jumlah Gangguan Ytantibum (n)}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum Tahun (n)}} \times 100\% \\ &= \frac{66-60}{60} \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

# BAB I

# PENDAHULUAN

- 01 LATAR BELAKANG
- 02 LANDASAN HUKUM
- 03 TUJUAN
- 04 CASCADING KINERJA
- 05 GAMBARAN SOPD
- 06 DUKUNGAN SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
- 07 HASIL TINDAK LANJUT TERHADAP LHE 2022
- 08 SISTEMATIKA PENULISAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Balangan No 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan perencanaan strategis yang di tetapkan masing-masing Instansi. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
2. Mendorong Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 di sampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah di tetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan SAKIP di dasarkan pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



5. Permendagri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Permendagri No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
7. Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Tekhnis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Permendagri No 51 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Bupati Balangan No 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pertanggungjawaban tersebut di sajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

### **C. Tujuan**

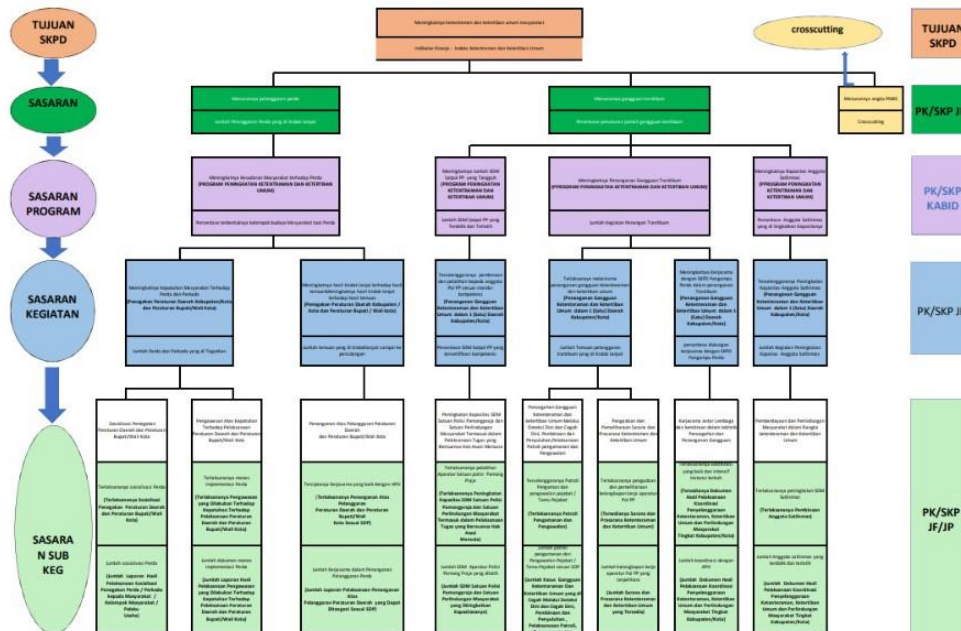
Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah :

- Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 bertujuan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam satu tahun. anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

- Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023.
- Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja.

### D. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Balangan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



## **E. Gambaran Umum SOPD**

Tugas dan Fungsi Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (3) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
    1. ketenteraman;
    2. ketertiban umum; dan
    3. perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan administrasi satuan; dan
- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah .
    - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    - d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
    - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :



## **F. Isu - Isu Strategis**

Keberadaan sebuah institusi bergantung dari sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu - isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut :

1. Kesiapan menghadapi Pemilu serentak 2024.

Anggota Satlinmas sebagian besar berusia lanjut, sementara ketugasan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu sangat berat, mulai dari saat pembuatan TPS hingga selesainya penghitungan suara dilakukan. Kementerian Dalam Negeri berencana untuk menetapkan kebijakan bahwa untuk Pemilu 2024 anggota Satlinmas yang dapat bertugas di TPS hanya yang dinyatakan sehat setelah dilakukan uji kesehatan dan akan diberikan batasan usia maksimal

2. Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pemenuhan SPM belum didukung penuh, terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM serta pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan trantibumlinmas.

3. Kejahatan jalanan / klithih yang makin marak.

Perlu adanya patroli gabungan yang intens dilakukan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, Polres Balangan, peningkatan program Satpol PP Go To School, serta membangun partisipasi aktif Satlinmas Desa untuk mengedukasi dan tindakan preventif warga masyarakat di wilayahnya agar tidak terlibat kejahatan jalanan / klithih.

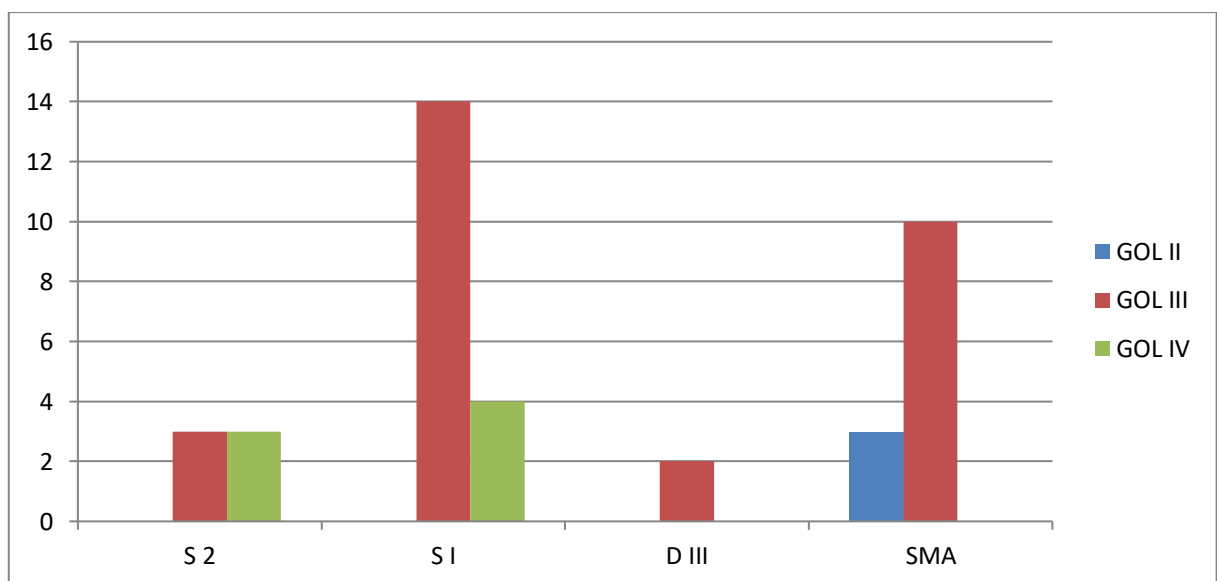
## **G. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

### **1. Dukungan SDM**

SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terdiri dari Karyawan / karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 berjumlah 264 pegawai yang terdiri dari 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 225 Tenaga Kontrak, dengan perincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD					
2	SMP					
3	SMA		3	10		13
4	D- 1					
5	D- 2					
6	D- 3			2		2
7	D- 4/S- 1					
8	S- 1			14	4	18
9	S-2			3	3	6
10	S- 3					
<b>Jumlah</b>			3	29	7	<b>39</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan CUKUP TINGGI, di dominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang (46,15%) disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 13 orang (33,33) S2 6 orang (15,38%) D3 2 orang (5.13%) Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki - laki bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki - laki. Hal ini menunjukkan masih belum maksimalnya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Persentase Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Dapat di lihat pada Grafik di bawah ini :



Masih terdapat kekurangan pegawai, Meskipun masih terdapat banyak kekurangan pegawai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai tambahan 225 Tenaga Harian Lepas (THL) Hal ini tentu membantu pada optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di bidang kelembagaan dan tata laksana, standarisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.



## 2. Sarana Prasarana

Sarana peralatan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada setiap Bidang. Sarana pendukung utama administrasi berupa komputer, laptop, printer, dan proyektor LCD juga masih minim jumlahnya (sebagian merupakan komputer lama / sudah rusak atau dalam kondisi mati total dan sudah diusulkan untuk penghapusan aset pada tahun 2023). Kamera dan peralatan sound system untuk pelaksanaan zoom meeting juga belum tersedia sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan rapat online di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Ketersediaan ruangan kerja dan ruang rapat pada gedung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menjadi persoalan karena kurang memadai. Saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan hanya memiliki 1 ruang rapat dengan kapasitas ruangan 10 – 20 orang. Kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai lembaga maupun OPD lainnya membutuhkan ruang rapat dengan daya tampung yang besar., begitu juga ruangan Sekretariat PPNS dan ruang penyidikan. Hal ini tentunya penting, mengingat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah”. Selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya, dimana penunjukan tersebut dilakukan oleh Kepala Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaku aparat penegak Perda / Perkada juga membutuhkan Command Center yang merupakan suatu ruangan khusus yang berfungsi sebagai pusat komando yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang diperlukan. Command Center akan menjadi tempat dimana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaku pengambil keputusan bersama - sama dengan tim, melakukan pertemuan, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis / permasalahan yang dihadapi, baik tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan, dan langkah penyediaan informasi publik. Command Center sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sarana mobilitas penunjang utama penegakan Perda / Perkada yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga masih kurang memadai, dikarenakan armada roda empat yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagian besar sudah berumur tua .Sangat dibutuhkan mobil patroli yang memadai untuk pelaksanaan patroli pengawasan kejahatan jalanan (klithih) di tengah malam hingga subuh dan truk sky lift yang dapat memudahkan dalam penertiban reklame. Kebutuhan akan garasi Mobi Operasional dan Pengawalan.

Tim Reaksi Cepat Atau Trecc yang tersebar di 8 Kecamatan terutama sebagai garda terdepan Penanganan Trantibum di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana, yang memadai Sarana Prasarana yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	GEDUNG KANTOR	3	BUAH	BAIK
	HAND TALKY	30	BUAH	BAIK
2	PAKAIAN DALMAS	40	PAKET	BAIK
3	ROMPI	160	BUAH	BAIK
4	KENDARAAN OPERASIONAL			
	a. Kendaraan Roda 2 ( dua ) Pengawalan	7	UNIT	5 BAIK, 2 RUSAK
	b. Mobil Operasional Pengawalan	2	UNIT	BAIK
	c. Mobil Operasional Patroli	4	UNIT	BAIK
		<b>246</b>		

### 3. Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong kabupaten Balangan berasal dari APBD Daerah Kabupaten Balangan. Terlihat pada anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebesar 17,530,914,109 yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa dan belanja Modal Peralatan dan Mesin, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

REKAPITULASI BELANJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023		
URAIAN BELANJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
BELANJA OPERASI	13.548.761.329	16.320.938.209
BELANJA PEGAWAI	5.769.424.429	6.535.809.949
BELANJA BARANG JASA	7.779.336.900	9.785.128.260
BELANJA MODAL	720.709.000	1.209.975.900
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	695.709.000	1.084.975.900
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	25.000.000	125.000.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>14.269.470.329</b>	<b>17.530.914.109</b>

## H. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT TERHADAP LHE SAKIP 2022						
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PROGRES PENYELESAIAN	LINK GEOGLE DRIVE
A	Jasi Atas Perencanaan Kinerja					
	<b>Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,90</b>					
	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	Untuk Menyusun dan menetapkan SOP /pedoman teknis perencanaan kinerja.	membentuk Tim Penyusun SOP Pedoman Tekhnis perencanaan Kinerja untuk Menyusun dan Menetapkan SOP pedoman teknis perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	SELESAI	<a href="https://drive.google.com/file/d/1aofKDIFWLDuLR_Ox8HILixMPXILLy19/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1aofKDIFWLDuLR_Ox8HILixMPXILLy19/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Z_wZRvA6fLVoE6HkmlnuRN27iO9GfOIL/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://drive.google.com/file/d/1aofKDIFWLDuLR_Ox8HILixMPXILLy19/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1aofKDIFWLDuLR_Ox8HILixMPXILLy19/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Z_wZRvA6fLVoE6HkmlnuRN27iO9GfOIL/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
	Rencana Aksi Kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum di pantau secara berkala , belum sepenuhnya terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang di tetapkan dari hasil analisis perbaikan sebelumnya	Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala melalui Rencana Aksi.  Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja secara berkala per triwulan melalui rencana aksi  memanfaatkan hasil perbaikan sebelumnya sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang di tetapkan	SATPOL PP  SATPOL PP	Pelaksanaan Evaluasi capaian Kinerja sampai pada Triwulan II  SELESAI	<a href="https://docs.google.com/document/d/1Z_wZRvA6fLVoE6HkmlnuRN27iO9GfOIL/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Z_wZRvA6fLVoE6HkmlnuRN27iO9GfOIL/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
	<b>Evaluasi dan Pengukuran Kinerja</b>					
	Keberadaan Belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Menyusun dan menetapkan SOP /pedoman teknis pelaksanaan pengukuran kinerja.	membentuk Tim Penyusun SOP Pedoman Tekhnis perencanaan Kinerja untuk Menyusun dan Menetapkan SOP pedoman teknis pelaksanaan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	SELESAI	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ODGgR70zK2hyHw3pnU52RpVlv2qL1vUy/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ODGgR70zK2hyHw3pnU52RpVlv2qL1vUy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ODGgR70zK2hyHw3pnU52RpVlv2qL1vUy/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ODGgR70zK2hyHw3pnU52RpVlv2qL1vUy/view?usp=sharing</a>
	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan	Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan Jabatan baik struktur	Menjadikan pengukuran Kinerja sebagai dasar usulan penempatan ataupun penghapusan jabatan baik struktural	SATPOL PP	PROSES	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Hbbk1pc_gS1oD5oLUa6Wwg5KMJgAXFh/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Hbbk1pc_gS1oD5oLUa6Wwg5KMJgAXFh/view?usp=sharing</a>
	<b>Evaluasi atas pelaporan Kinerja memperoleh</b>					
	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level nasional / Internasional	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) menginfokan Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja di Level nasional (Benchmark Kinerja).	Akan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja di level Nasional (benchmark Kinerja)	SATPOL PP	Telah mengumpulkan Informasi tentang target Nasional Tahun 2023	<a href="https://docs.google.com/document/d/1O3tdz2Hqnr0T1p9KBa3iFkFOJbGxAz/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1O3tdz2Hqnr0T1p9KBa3iFkFOJbGxAz/edit?usp=sharing&amp;ouid=102323697408903078166&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,25</b>					
	Belum sepenuhnya ada pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah di akui/ di formalkan. Evaluasi di lakukan dengan dasar target Kinerja yang telah di tetapkan pada rencana	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui / diformalkan.Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga	Menyusun pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan target kinerja pada rencana aksi sebagai acuan dalam setiap triwulan	SATPOL PP	SELESAI	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ELyr1s-O7DwtoY2HXNBLBQ9tfzEG23w/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ELyr1s-O7DwtoY2HXNBLBQ9tfzEG23w/view?usp=sharing</a>
	Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja	Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal sebagai bahan masukan untuk perbaikandan peningkatan kinerja	SATPOL PP	Telah di laksanakan beberapa perbaikan dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Kinerja Internal sampai pada Triwulan II (Dua)	<a href="https://drive.google.com/file/d/117H_Bxn42ki4f6uUKgUKSQk0Mif35v-y/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/117H_Bxn42ki4f6uUKgUKSQk0Mif35v-y/view?usp=sharing</a>
		Mengajukan permintaan reuiu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepda Inspektorat Daerah (APIP) sebelum	Akan me minta Reuiu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 sebelum melakukan evaluasi Sakip dan Reuiu LPPD	SATPOL PP	Akan meminta Reuiu pada akhir tahun 2023	

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

## **I. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **C. Kinerja Lainnya**

Pada sub bab ini diuraikan Kinerja SKPD lainnya

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan upaya / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

01

RENCANA STRATEGIS

02

STRATEGI DAN ARAH  
KEBIJAKAN

03

RENCANA KINERJA (RENJA)  
TAHUN 2023

04

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) TAHUN 2023

05

PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda realokasi anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal penjamin ketersediaan Anggaran, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pamong Praja yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program / kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026;

#### **A. Renstra SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan)**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan manifestasi komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2021- 2026 tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen landasan/acuan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 -2026.

##### **a. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 ( lima ) tahun, maka untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah dengan mewujudkan Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

**“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya di canangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur perdesaan dan perkotaan ;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Masyarakat Balangan;



4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintah sebagai abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial , Budaya dan Agama serta pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif;

Berkaitan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terkait langsung dengan misi ke- 5 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yaitu:

1. Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta dan kondusifitas Daerah;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat
3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis selama lima tahun (2021 - 2026) yaitu :

**“MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT”**

Dengan Indikator Tujuan :

**“INDEKS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

#### **b. Sasaran**

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Maka untuk mencapai sasaran yang di inginkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menetapkan sasaran sebagai berikut :

##### **1. MENURUNNYA PELANGGARAN PERDA**

Dengan Indikator Sasaran:

**Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti**

##### **2. MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM**

Dengan Indikator sasaran:

**PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN TRANTIBUM**

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang di tetapkan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		<b>INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti
2	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**Tabel II.1. Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan**

Rencana Strategis ( RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 Penyesuaian Dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

## Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

### RENSTRA-P PERIODE 2021-2026

#### DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
<b>MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b>				<b>INDEKS PERSEPSI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>MENURINYA PELANGGARAN PERDA</b>	65	BERESAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<b>JUMLAH PELANGGARAN PERDA YANG DI TINDAK LANJUTI</b>	25 Kasus	23 Kasus	22 Kasus	18 Kasus	16 Kasus	14 Kasus	14 Kasus								
	<b>MENURINYA GANGGUAN TRANSTRIBUM</b>			<b>PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN TRANSTRIBUM</b>	N/A	N/A	10%	10%	15%	15%	50%								
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Transtribum	1 05 02	PROGRAM PEMINGGATAN KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Pramong Praja Transtribum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	750 Kegiatan	750 Kegiatan	4627.386.225	750 Kegiatan	750 Kegiatan	3750 Kegiatan							
	Meningkatnya Jumlah SIM Satpol PP yang Tanggah			Jumlah SIM Satpol PP yang Tanggah dan Tertah	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 Orang							
	Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlumas			Persentase Anggota Satlumas yang di tangguhkan Kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Meningkatnya Keselamatan Masyarakat terhadap Perda			Persentase kepatuhannya kelompok hanya Masyarakat tua Perda	30%	40%	50%	60%	65%	90%	90%								
	Tereleongannya pembinaan dan pelatihan kepada anggota PAI PP sesuai standar kompetensi	1 05 02 2 01	Kegiatan Pengawasan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIM Satpol PP yang sertifikasi kompetensi	65%	70%	75%	3.842.868.750	80%	90%	100%	100%							
	Terlaksananya inkuisitoris penanganan gangguan ketertamanan dan ketertiban umum			Jumlah Temuan pelanggaran transribum yang di tindak lanjut	75 Kasus	70 Kasus	66 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	14 Kasus							
	Meningkatnya Dukungan Kejasama yang baik dengan SKPD Perangkat Daerah dalam Tahap penanganan Transribum			Persentase dukungan kejasama SKPD Perangkat Daerah	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%							
	Tereleongannya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlumas			Jumlah Anggota Satlumas yang di tangguhkan Kapasitasnya	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang							
	Terlaksananya Penilai Pengawasan dan Pengawasan	1 05 02 2 01 01	Pencegahan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan/Pelaksanaan Patrol pengamatan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol Pengamatan dan Pengawasan	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus	750 Kasus							
	Terlaksananya Peshinaan Anggota Satlumas	1 05 02 2 01 04	Pembinaan dan Perindugan Masyarakat dalam Rangka ketertamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pembinaan/Perindugan Masyarakat dalam Rangka Ketertamanan dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen							
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SIM Satuan Bhaba Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat Tematik dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermutu Baik Asasi Manusia	1 05 02 2 01 05	Peningkatan Kapasitas SIM Satuan Bhaba Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat Tematik dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermutu Baik Asasi Manusia	Jumlah SIM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat yang di tangguhkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang							
	Terjadinya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kondisi Penyelenggaraan Ketertamanan, Ketertiban Umum dan Perindugan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 05 02 2 01 06	Kejasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Perangan Gangguan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertamanan, Ketertiban Umum dan Perindugan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen							
	Terjadinya Sarana dan Prasarana Ketertamanan dan Ketertiban Umum	1 05 02 2 01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertamanan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit							
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perchab	1 05 02 2 02	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perchab yang di tegakkan	24 Perda	24 Perda	24 Perda	34.284.200	24 Perda	24 Perda	24 Perda	24 Perda							
	Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan/kegiatan yang tidak lanjut terhadap hasil temuan			Jumlah temuan yang di indaklanjuti sampai ke penyelesaian	20 Kasus	15 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus							
	Terlaksananya sosialisasi Perda (Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 05 02 2 02 01	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah / Perchab kepada Masyarakat / Komunitas Masyarakat / Pejabat Jabat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan							
	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 05 02 2 02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan							
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	1 05 02 2 02 03	Pengawasan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang Dapat Di tangguhkan Sesuai SOP	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan							

No	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator	Kategori	Nilai SKKP Perangkat Daerah	62,40 Angka / Nilai		72,40 Angka / Nilai		74,40 Angka / Nilai		75,40 Angka / Nilai		76,20 Angka / Nilai		Target	Realisasi	Catatan	
					62,40 (8) Nilai	70,40 (8) Nilai	72,40 (8) Nilai	74,40 (8) Nilai	75,40 (8) Nilai	76,20 (8) Nilai	76,20 (8) Nilai	76,20 (8) Nilai						
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PEMUNANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NORA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SKKP)	62,40 (8) Nilai	70,40 (8) Nilai	1.042.710,00	72,40 (8) Nilai	1.094.329.550	74,40 (8) Nilai	1.293.752.550	75,40 (8) Nilai	1.324.127.850	76,20 (8) Nilai	1.455.543.550	76,20 (8) Nilai	6.129.951.440	
	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	59.255.000	100 %	62.217.750	100 %	66.458.525	100 %	75.283.470	100 %	82.811.620	100 %	340.007.570	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Tersesunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Kondisi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	X.XX.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan				
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan				
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	4.739.120,00	100%	4.907.458,440	100%	5.464.204,284	100%	6.016.247,712	100%	6.611.687,163	100%	27.384.987.419	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.202.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meresmi Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan				
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	95.377.000	100%	100.146.735	100%	110.161.475	100%	121.177.822	100%	133.295.384	100%	580.193.175	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	X.XX.01.205.02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	265 Paket	265 Paket		265 Paket		265 Paket		265 Paket		265 Paket				
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X.XX.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang				
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	185.706.700	100%	194.950.025	100%	214.491.235	100%	235.940.362	100%	259.534.358	100%	1.090.964.725	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	X.XX.01.206.04	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor yang Diperlukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diperlukan	12 Paket	12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket				
	Terdapatnya Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01.206.05	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan yang Diperlukan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diperlukan	12 Paket	12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket				
	Terdapatnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01.206.06	Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diperlukan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diperlukan	12 Paket	12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Perangkat Daerah	X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	8.465.000	100%	8.889.300	100%	9.778.200	100%	10.756.025	100%	11.821.650	100%	49.721.240	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X.XX.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlukan	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit				
	Terdapatnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X.XX.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit				
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	73.759.400	100%	77.489.370	100%	85.238.307	100%	93.762.139	100%	103.138.350	100%	493.427.566	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Perangkat Daerah yang Baik	100%	100%	197.000.000	100%	208.850.000	100%	227.535.000	100%	250.288.500	100%	275.317.350	100%	1.156.980.820	SATUAN POLIS RAMONG PRAJA
	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X.XX.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	45 Unit	45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit				
	Terlaksananya Pemeliharaan Perawatan dan Meja Lainnya	X.XX.01.209.06	Pemeliharaan Perawatan dan Meja Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Perawatan dan Meja Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit		81 Unit		81 Unit		81 Unit		81 Unit				
	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	X.XX.01.209.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit				

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Melalui operasi yustisi dan non yustisi, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan bagi pelanggar Perda dan/atau Perkada, serta pembinaan PPNS	Terwujudnya masyarakat dan institusi yang patuh terhadap Perda dan/atau Perkada
2	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Melalui patroli Pengamanan dan pengawalan, operasi trantibum untuk menciptakan ketenyteraman dan ketertiban umum	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentruman masyarakat
		Meningkatnya kapasitas satlinmas	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas serta meningkatnya kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Meningkatnya koordinasi dengan semua jejaring kerja	Meningkatkan sinergitas antar instansi vertikal, OPD yang menjadi Crosscutting dan kabupaten/kota
		Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.	Mewujudkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang humanis, profesional dan berwibawa

Kebijakan yang diambil antara lain :

1. Berupaya Meningkatkan Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Balangan sehingga tercipta suasana aman nyaman dan tertib di lingkungan masyarakat Kabupaten Balangan.
2. Berupaya Meningkatkan Sumber Daya manusia Aparatur / anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan ,sehingga di harapkan mampu menghadapi setiap permasalahan yang timbul, terutama akibat pengaruh globalisasi yang telah masuk ke Kabupaten Balangan, dengan membekali keterampilan dan keahlian khusus, pendidikan dasar dan karir Satpol PP sehingga di harapkan mampu menghadapi setiap permasalahan yang timbul.
3. Mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada melalui optimalisasi tugas dan fungsi, PPNS dan kerjasama dengan instansi terkait.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam program pembangunan, khususnya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran Satlinmas dengan cara meningkatkan kesejahteraan, melengkapi sarana dan prasarana Satlinmas,
5. Melengkapi sarana Penunjang bagi kegiatan opearasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah tersebut Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menerapkan program prioritas, yaitu “Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum”. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagai leading sektor bidang Trantibum Kabupaten Balangan juga ikut mendorong peningkatan keamanan masyarakat melalui

Program dan Kegiatan kegiatan yang sudah di laksanakan selama ini. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Balangan berupaya untuk menurunkan gangguan Trantibum dan Menurunkan Pelanggaran Perda di kabupaten Balangan.

### **C. Renja SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan)**

Dengan memperhatikan arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (Dua) Program dan 9 (Sembilan ) Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten / Kota :
  - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
  - b. Administrasi keuangan dan perangkat daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Daerah
  - f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah / Kota
  - b. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / walikota.

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Balangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			14.269.470.329				15.696.417.362				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.40	7.864.140.329	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	74.40	8.650.554.362			
1	05	01	2,01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	186.606.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	205.267.040		
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dukomen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	116.654.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	bimtek & perjalanan dinas	2 Dukomen	128.319.840
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan La[oran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.671.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Makan Minum & Perjalanan Dinas	1 Laporan	22.738.320
1	05	01	2,01	07	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	49.280.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Bmtek & Perjalanan Dinas	1 Laporan	54.208.880



1	05	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5.769.424.429	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	6.346.366.872
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Bulan	5.769.424.429	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	6.346.366.872
1	05	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	675.064.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	742.571.060
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	605.014.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pendidikan & Pelatihan Khusus Satpol	79 Orang	665.516.060
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	70.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Bimtek & Perjalanan Dinas	25 Orang	77.055.000
1	05	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	357.047.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	392.752.470
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket	53.880.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Benda Post	1 Paket	59.268.660
1	05	01	2.06	05	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket	21.547.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Cetak dan Penggandaan	1 Paket	23.701.810
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	8.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Surat Kabar dan Majalah	1 Dokumen	9.438.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan	273.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Perjalanan Dinas	120 Laporan	300.344.000

1	05	01	2,07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	353.767.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	389.144.140
1	05	01	2,07	01	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	353.767.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan pakai habis	3 Unit	389.144.140
1	05	01	2,08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	134.814.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	148.296.170
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Kumonikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	134.814.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Listrik dan Air	1 Laporan	148.296.170
1	05	01	2,09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	387.415.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	426.156.610
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	372.315.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- BBM, Suku Cadang, Pajak Kendaraan Dinas	3 Unit	409.546.610
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	15.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pemeliharaan Alat Kantor dan Peralatan Komputer	Unit	16.610.000

1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kegiatan	6.405.330.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		750 Kegiatan	7.045.863.000
					Jumlah SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Orang	
					Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	
					Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		60%	
1	05	02	2,01	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Kasus	5.936.770.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		60 Kasus	6.530.447.000
					Persentase SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi		75%			80%		
					Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya		2355 Orang			2355 Orang		
					persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda		70%			80%		
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kasus	5.409.594.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor Tenaga Kontrak SatpolPP	750 Kasus	5.950.553.400
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	457.176.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pelaksana kegiatan dan makan minum kegiatan	8 Dokumen	502.893.600
1	05	02	2,01	06	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokume	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pihak ketiga dan makan minum kegiatan	4 Dokumen	77.000.000

1	05	02	2,02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Perda	468.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Perda	515.416.000
						Jumlah temuan yang di tindak lanjuti sampai ke persidangan		10 Kasus				10 Kasus	
1	05	02	2,02	01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	56.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	=Makan minum kegiatan dan perjalann dinas	8 Laporan	61.974.000
1	05	02	2,02	02	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	412.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-Honor tim dan makan minum	24 Laporan	453.442.000

**Tabel.II.3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan**

#### **D. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD (2021 – 2026)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Balangan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026 Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dilakukan Penyesuaian berdasarkan Permendagri no.900.1.15.5.13-17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri No 050.5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 . Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD,sehingga indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan .

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 s/d 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	10%	10%	10%	100%

**Tabel.II.4.IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023**

### **E. Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Berdasarkan (RPJMD 2021 – 2026)**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam kelengkapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Balangan sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	22 Angka Pelanggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7,864,140,329
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6,405,330,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.14,269,470,329</b>

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%
2	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%



PROGRAM	ANGGARAN
Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp. 7,574,102,560
Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Rp. 9,956,811,549
JUMLAH	Rp. 17,530,914,109

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

**01**

**CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

**02**

**REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2023**

**03**

**KINERJA LAINNYA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Menetapkan Kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja dengan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terlebih dahulu suatu Instansi Pemerintah membuat suatu pernyataan perjanjian kinerja sebagai komitmen dari Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Di dalam penetapan perjanjian kinerja telah dijabarkan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan yang terwujud dalam suatu target pencapaian yang kuantitatif agar dapat dinilai tingkat keberhasilan dari masing – masing sasaran

Oleh karena itu dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, maka di gunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel III.1. Skala Pengukuran Kinerja**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>Interval Capaian Kinerja</b>	<b>Kinerja Capaian Kinerja</b>	<b>Kode</b>
I	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi
III	66 % ≤ 75 %	Sedang
IV	51 % ≤ 65%	Rendah
IV	≤ 50 %	Sangat Rendah

**1. Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja 2023**

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang di peroleh bersifat absolute merupakan hasil operasi aritmatika pembobotan mulai dari kegiatan hingga ke sasaran, namun karena terdapat hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan-kegiatan pendukungnya sehingga pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan yang berupa indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan impact.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, menggunakan rumus sebagai berikut :  
Seluruh pengukuran capaian kinerja LKjIP ini disusun secara absolute dan terfokus pada satu atribut sehingga dapat mengeliminir distorsi yang disebabkan oleh aritmatik pembobotan. Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan

**1. Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti}}{\text{jumlah pelanggarn Perda}} \times 100\% \\
 &= \frac{20}{20} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

## 2. Indikator Persentase penurunan gangguan Trantibum

$$\begin{aligned} &= \frac{julah\ kasus\ (n-1) - JumlahKasus\ (n)}{Jumlah\ Kasus\ (n)} \times 100\% \\ &= \frac{66-60}{60} \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

### 1.a. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja 2023

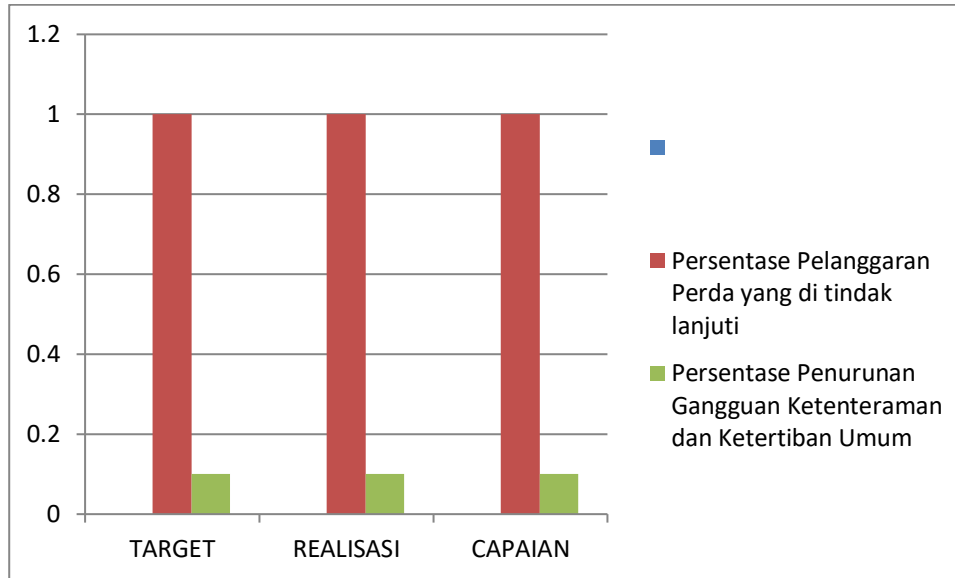
Sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 memiliki 2 (Dua) Sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran yang sudah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa dari 2 (Dua) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi.

Capaian Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 untuk sasaran menurunnya pelanggaran Perda dengan Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti adalah sebanyak 20 Kasus pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti dari 20 Kasus pelanggaran pelanggaran perda yang terjadi dengan capaian sebesar 100% . dan untuk sasaran Menurunnya Gangguan Trantibum dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Gangguan Trantibum adalah sebesar 10% dari sebanyak 60 Kasus Pelanggaran Trantibum tahun ini (n) dan pelanggaran Trantibum Tahun Lalu (n-1) sebanyak 66 kasus dengan capaian 10% dari Target Kinerja sebesar 10% dengan Capaian 100%.

Rincian Capaian Realisasi Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 terhadap Taget Kinerja Satuan Polisi pamong Praja 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	10%

Tabel.III.2.Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Utama 2023 terhadap Target Kinerja Utama 2023



Gambar Diagram Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Utama 2023 terhadap target Kinerja Utama 2023

## 2. Capaian Realisasi Kinerja 2023 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang di sajikan pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29 Angka Pelanggaran	23	22	140,35%			
2	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	n/a				100%	100%	100%
3	MENURUNYA GANGGUAN TRANSTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a				10%	10%	100%

Tabel.III.3. Perbandingan Capaian Kinerja Utama 2023 terhadap Capaian Tahun 2022

### 2.a. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Capaian Kinerja di tahun 2023 untuk Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti ini adalah 20 Kasus Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti dari 20 Kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan Capaian 100%, namun untuk Indikator ini tidak dapat di sandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu di karenakan terdapat perbedaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja di karenakan adanya penyesuaian Renstra Sedangkan untuk Indikator

Penurunan Gangguan Trantibum adalah sebanyak 60 Kasus pelanggaran Trantibum pada tahun Berjalan (n) dan 66 kasus pelanggaran Trantibum pada tahun lalu (n-1) dengan capaian 10% dari Target Kinerja Sebesar 10% dengan capaian Kinerja sebesar 100%, Namun Indikator ini tidak dapat di sandingkan dengan capaian tahun lalu di karenakan adanya perbedaan Sasaran, Indikator dan Komponen di dalamnya.

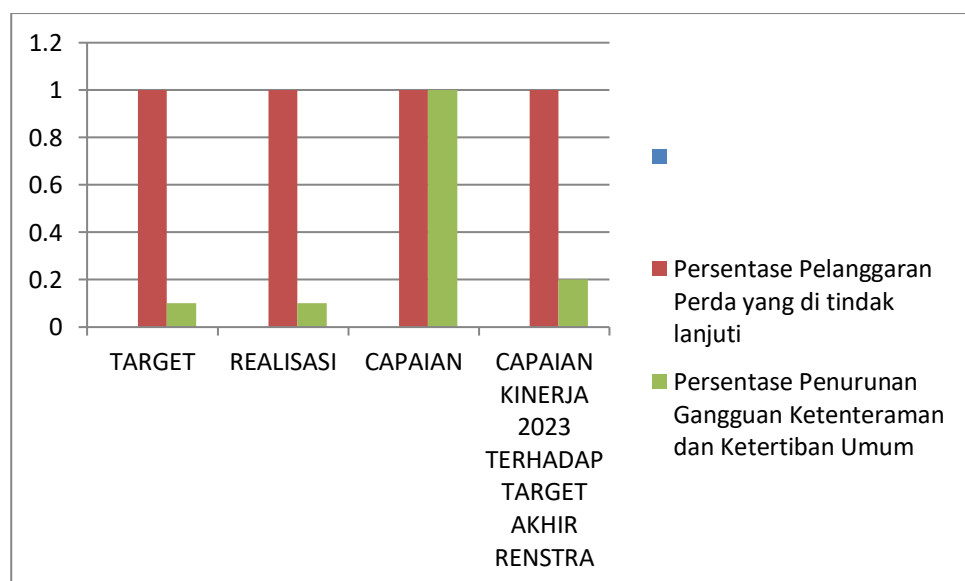
### 3. Capaian Kinerja Utama 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

#### A. Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Renstra tahun 2021 – 2026

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2023 terhadap target akhir Rensta dengan Tahun 2021 -2026 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan Target capaian akhir kinerja Renstra 2021-2026. Yang di sajikan pada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET AKHIR RENSTRA	TAHUN 2023			CAPAIAN KINERJA 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	50%	10%	10%	100%	20%

Tabel.III.5. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 Terhadap Capaian akhir Renstra 2021-2026



Gambar Diagram capaian kinerja 2023 terhadap target akhir renstra 2021-2026

#### **A.1 Analisis Capaian Kinerja 2023 Terhadap Capaian akhir Renstra 2021-2026**

Capaian 2023 untuk Indikator Kinerja Persentase pelanggaran perda yang di tindaklanjuti adalah sebanyak 20 Kasus pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti dari 20 kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan capaian 100% terhadap target Akhir Renstra adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. dan untuk Indikator Penurunan gangguan Trantibum adalah sebanyak 60 kasus pelanggaran Trantibum di tahun ini (n) dan terdapat pelanggaran Trantibum sebanyak 66 kasus di tahun lalu (n-1) dengan capaian 10% dari target akhir Renstra sebesar 50% dengan capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 20%.

#### **4. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Standar Nasional Tahun 2023**

Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya aturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sudah ada revisi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan target nasional yang di adopsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang tertuang dalam target capaian indikator dengan target nasional yakni sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Pencapaian Penerima Layanan dasar
- b. Target pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa target pada tahun 2023 target nasional sebesar 100%. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam menentukan target capaian dalam dokumen perencanaan strategis mengacu kepada program nasional sehingga pencapaian setiap tahunnya 100%. Dimana rumusan perhitungan untuk mencapai target capaian dimaksud adalah jumlah Total Warga Negara yang harus di layani di bagi dengan Jumlah Warga Negara yang Terlayani di Kali 100%. Jumlah Warga Negara yang harus di layani merupakan hasil patroli dilapangan, aduan dari masyarakat dan hasil penyelidikan dan penyidikan. Adapun penunjang capaian indikator Persentase Pencapaian Terhadap layanan dasar tersebut yaitu :
  1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)
  2. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)
  3. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan



- pengobatan)
4. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
  5. Standar sarana prasarana Satpol PP jumlah dan kualitas barang dan jasa : (a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)

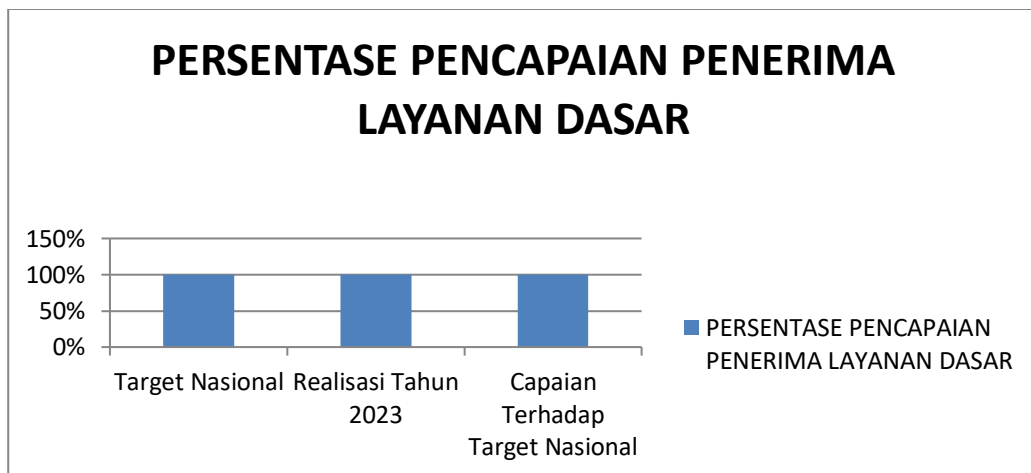
#### 4.1 Analisis Capaian Kinerja 2023 Terhadap Target Nasional (SPM)

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Standar Nasional Tahun 2023 adalah Jumlah Warga Negara yang harus di layani sebanyak 8000 Orang dan Jumlah warga Negara yang terlayani sebanyak 8000 Orang dengan Capaian Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 100% dari target Nasional tahun 2023 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar sebesar 80%, Rincian Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Standar Nasional 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Capaian Kinerja Utama Terhadap Target Nasional (SPM)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan  
Tahun 2023**

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN			TARGET NASIONAL	CAPAIAN KINERJA 2023 TERHADAP TARGET NASIONAL
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel.III.7.Perbandingan Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Nasional 2023 (SPM)**



**Gambar Diagram Capaian Kinerja 2023 Terhadap Target Capaian Nasional Tahun 2023**

**Capaian Akhir Standar Pelayanan Minimal ( SPM 2023) tergambar dalam Laporan E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja 2023 dapat di lihat pada SS E SPM 2023 sebagai berikut:**

KATEGORI PENCAPAIAN TRANTIBUM						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA 100		100.00 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	8000	8000	0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	26	26	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2600	2600	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00 %

Gambar SS Capaian SPM Trantibum Satpol PP 2023 terhadap Target Nasional SPM Trantibum 2023

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran

- Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di Tahun 2023 antara lain :
  - Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  - Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
  - Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan kedinasan di luar kantor.
  - Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan baru yang sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
  - Terjalinnnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
  - Pelatihan mental, spiritual dan fisik yang rutin
  - Pengikut sertakan anggota Sat.Pol.PP dalam pelatihan dan pendidikan berjenjang
- Permasalahan yang masih di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di Tahun 2023 antara lain :

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa.

- ❖ Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.
- ❖ Masih kurangnya anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi

- ❖ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.
- c. Tindak Lanjut Yang akan di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan antara lain :
- Meningkatkan Sarana Prasaran Pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
  - Mengoptimalkan anggaran pendukung kegiatan dalam rangka peningkatan Kinerja satuan polisi pamong Praja
  - Meningkatkan kerjasama dengan APH
  - Meningkatkan Pengawasan dan penegakan perda dan perkada
  - Meningkatkan Pembinaan terhadap satlinmas Desa dan Kelurahan dalam rangka Peningkatan Trantibum

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis Menurunya Pelanggaran Perda Dengan Indikator Sasaran Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti telah tercapai 100 % dari jumlah pelanggaran Perda sebanyak 20 kasus dan di tindak lanjuti sebanyak 20 kasus dengan capaian 100% dari target kinerja 100% dan Untuk Sasaran Menurunya Gangguan Trantibum dengan Target Persentase Penurunan Gangguan Trantibum Telah Mencapai 100% dari target Kinerja 10% dengan Realisasi sebesar 10%, namun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel III.8. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2023			REALISASI ANGGARAN 2023			CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN 2023	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI ANGGARAN	CAPAIAN
2	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	17.530.914.109	16.564.936.177	94.49%	965.977.932	5.51%
3	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	100%					

Di lihat dari Capaian dari realisasi anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 16.564.936.177 jika di bandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 17.530.914.109 dengan Capaian 94.49% sehingga di dapatkan efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2023 sebesar Rp.965.977.912 jika dibandingkan dengan target anggaran 2023 sebesar Rp. 17.530.914.109 dengan capaian efisiensi sebesar 5,51%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam Sub Bab ini akan di sajikan analisis yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72,40	73,60	101,66%	9.983.811.549	9.122.300.744	91,37%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	100%	7.547.102.560	7.442.635.433	98,62%
		Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	75%	75%	100%			
		Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100%			
		Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	100%	100%	100%			

Tabel III.9. Capaian Program Prioritas Tahun 2023

Target capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum pada tahun 2023 adalah sebesar 750 Kegiatan terealisasi sebesar 750 Kegiatan dengan capaian 100 % , untuk Indikator Persentase SDM Satpol PP yang terdidik dan Terlatih dengan Target 75% terealisasi 75% dengan capaian 100%, Untuk Indikator Kinerja Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan kapasitasnya dengan Target 100% terealisasi 100% dari 2355 Orang anggota Satlinmas dan 2355 Orang Anggota Satlinmas yang di tingkatkan kapasitas nya dengan Capaian 100%, dan Indikator Kinerja Persentase Terbentuknya Kelompok Budaya Masyarakat Taat Perda sebesar 100 % terealisasi 100% dari target Kinerja sebanyak 4 Kelompok Masyarakat yang terdiri dari 1) kelompok Masyarakat pedagang kaki lima,2)Kelompok Masyarakat pengusaha rumah makan,3).Kelompok Masyarakat ASN/PNS 4) Kelompok Pelajar dengan realisasi terbentuknya 4 Kelompok budaya Masyarakat taat perda yaitu 1) kelompok pedagang taat perda 2) Kelompok pengusaha rumah makan taat perda 3).kelompok ASN taat perda 4.).Kelompok pelajar Taat Perda Capaian 100% yang berarti target kinerja program tercapai 100% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat Tinggi**.

Hal ini tercapai dengan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti kerjasama yang baik dengan SKPD Pengampu Perda dan juga dukungan yang baik dari Aparat Penegak Hukum (APH) terutama TNI/POLRI, dan juga pendekatan yang baik dan Humanis terhadap masyarakat.

Selain itu dukungan Sosialisasi Perda dengan layanan Jemput bola ke tempat tempat rawan terjadi Pelanggaran Perda serta Penegalan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah sejak dini yang di lakukan ke sekolah sekolah untuk menghindari maraknya kenakalan remaja yang berakibat terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketrtiban umum di masyarakat satuan polisi pamong praja juga membuka layanan pengaduan on line via Whatshap di mana setiap pengaduan yang masuk akan di tanggapi dengan cepat dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sudah Membentuk tim reaksi cepat yang tersebar di 8 Kecamatan di samping itu Tim Reaksi Cepat juga bersinergi dengan 2355 Orang Anggota Satlinmas Desa dan Kelurahan yang tersebar 157 desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan.

### 3.1 Foto Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas



### 3.2. Foto Sosialisasi penegakan Perda







**4.3 Foto Kegiatan Pelaksanaan Giat Trantibum**



#### 4.4 Foto Kegiatan Peningkatan SDM Satpol PP



#### B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 17,530,914,109 dengan Realisasi Rp. 16.564.936.177 dengan Capaian 94,49% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran perprogram, penyerapan anggaran terbesar pada program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 9.122.300.744 dari target sebesar Rp.9.956.811.549 dengan Capaian 91,62% Sedangkan penyerapan terkecil di sasaran pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 7.442.635.433 dari Target Sebesar Rp.7,574,102,560 dengan Capaian 98,26%.

hal ini dikarenakan rendahnya realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, diantaranya disebabkan oleh terdapatnya jabatan yang masih kosong/belum terisi, terdapat pegawai yang di mutasi dan pension, Secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini :



**CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
A	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100%	100%	100%	17.530.914.109	16.564.936.177	94,49	965.977.932
A.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100%	100%	100%	17.530.914.109	16.564.936.177	94,49	965.977.932
		10%	10%	100%				
a.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	72,40	73,60	101,66%	9.956.811.549	9.122.300.744	91,62	834.510.805
a.1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	232.838.000	210.525.852	90,42	22.312.148
1	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	130.734.400	121.157.152	92,67	9.577.248
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	35.765.200	32.760.200	91,60	3.005.000
3	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	66.338.400	56.608.500	85,33	9.729.900
a.2	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	6.535.809.949	5.984.634.717	91,57	551.175.232
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	100%	6.535.809.949	5.984.634.717	91,57	551.175.232
a.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	1.277.584.600	1.198.829.101	93,84	78.755.499
1	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	20 Orang	20 Orang	100%	701.534.600	640.207.201	91,26	61.327.399
2	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	20 Orang	20 Orang	100%	576.050.000	558.621.900	96,97	17.428.100
a.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	426.513.000	413.808.344	97,02	12.704.656
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	61.834.300	53.849.200	87,09	7.985.100
2	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket	100%	21.608.700	21.557.900	99,76	50.800
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Paket	12 Paket	100%	8.580.000	8.470.000	98,72	110.000
4	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	334.490.000	329.931.244	98,64	4.558.756
a.5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	100%	100%	100%	887.164.800	772.412.271	87,07	114.752.529
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	100%	125.000.000	119.560.000	95,65	5.440.000
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	762.164.800	652.852.271	85,66	109.312.529
a.6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	134.814.700	95.616.769	70,92	39.197.931
1	Penyediaan Jasa Kumonikasi sumber daya air ,dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	134.814.700	95.616.769	70,92	39.197.931
a.7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	462.086.500	446.473.690	96,62	15.612.810
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	45 Unit	100%	446.986.500	431.438.690	96,52	15.547.810
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Unit	81 Unit	100%	15.100.000	15.035.000	99,57	65.000



b.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	750 Kegiatan	750 Kegiatan	100%	7.574.102.560	7.442.635.433	98,26	131.467.127
		20 Orang	20 Orang	100%				
		100%	100%	100%				
		100%	100%	100%				
b.1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	75%	75%	100%	7.022.460.760	6.909.009.887	98,38	113.450.873
		60 Kasus	60 Kasus	100%				
		70%	70%	100%				
		2355 Orang	2355 Orang	100%				
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	750 Kasus	750 Kasus	100%	6.372.939.760	6.263.758.159	98,29	109.181.601
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	497.976.000	494.004.628	99,20	3.971.372
3	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	151.545.000	151.247.100	99,80	297.900
b.2	PENEKAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	24 Perda%	24 Perda	100%	551.641.800	533.625.546	96,73	18.016.254
		10 Kasu	10 Kasus	100%				
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	8 Laporan	8 Laporan	100%	119.551.800	113.780.000	95,17	5.771.800
2	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24 Laporan	24 Laporan	100%	432.090.000	419.845.546	97,17	12.244.454

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan Penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai Program / kegiatan disajikan pada tabel berikut:

#### Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2023			REALISASI ANGGARAN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	17.530.914.109	16.564.936.177	94.49%
3	MENURUNYA GANGGUAN TRANTIBUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	100%			

### C. KINERJA LAINNYA

#### 1. LAYANAN ADUAN ONLINE WHATSHAPP ( LA-LISA )

LALISA adalah bagian dari Inovasi Daerah Balangan ( Bailang ) yang di pelopori oleh satuan polisi pamong Praja dalam Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang di hasilkan / di capai dalam keseluruhan populasi yang di rasa menjadi sasaran di rasa masih sedikit di karenakan kondisi pelanggaran Perda dan Perkada maupun gangguan Kamtibmas tergolong rendah di kabupaten balangan, Namun Layanan Inovasi “ LA-LISA” Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat terus di jalankan dan di aktifkan, dengan harapan masyarakat tetap terlayani dengan semua pelayanan Tersebut.

Dengan Layanan Lalisa tersebut terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu tersedianya layanan online yang mudah untuk di akses oleh masyarakat, penyajian data laporan aduan layanan menjadi lebih mudah karena bersumber pada aduan yang ada pada program inovasi Lalisa, dimana admin dengan mudah admin merekapitulasi sduan yang sudah tertangani, kemudian data pelapor sebagai bahan pertanggungjawaban program apabila di butuhkan juga bias di sajikan secara internal mengacu pada jaminan kerahasiaan pelapor.

Dampak positif yang bias dirasakan dari Inovasi ini adalah kepuasan masarakat di mana masyarakat yang di layani dengan Inovasi La-lisa ini mengungkapkan kepuasannya melalui hasil survey kepuasan Masyarakat. Hal tersebut dapat di lihat dari keseharian warga masyarakat balangan yang merasakan ketenteraman dan keaaman serta rasa nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehari hari di semua aspek kehidupan masyarakat baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dll.

Sampel Kepuasan Masyarakat terhadap Inovasi La- Lisa dapat di lihat dari hasil survey sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		CAPAIAN			
		L	P	TIDAK PUAS	CUKUP PUAS	PUAS	SANGAT PUAS
1	PARINGIN	35	15	0	2	5	43
2	PARINGIN SELATAN	20	30	0	4	6	40
3	BATUMANDI	27	23	0	2	7	41
4	LAMPIHONG	31	19	0	3	4	43
5	JUAI	24	26	0	1	5	44
6	HALONG	19	31	1	3	3	43
7	AWAYAN	30	20	0	2	4	44
8	TEBING TINGGI	25	25	1	4	3	42
JUMLAH		211	189	2	21	37	340

Anggaran Inovasi La – Lisa ini di ambil dari Kegiatan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dengan memanfaatkan Sarana prasarana yang tersedia seperti Smartphone laptop dan mengambil sebagian anggaran makan minum rapat dari sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

## **2. SPARCO**

Sparco merupakan Akronim dari kata “Satuan Polisi Pamong Praja Rollinf To School, yaitu kegiatan yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengenalan , Sosialisasi Perda sekaligus Pembinaan Mental dan Fisik kepada Pelajar, Pelaksanaan Sparco di latarbelakangi oleh buah pemikiran di mana marak pelanggaran Perda yang terjadi di kalangan Pelajar, dimana di pandang perlu penegnanan tentang Perda yang berlaku sejak dini, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten balangan sebagai Penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

Kegiatan Sparco tersebut di lakukan dengan berbagai media, yaitu:

1. Melalui Atraksi bela diri dengan tujuan agar anak memiliki bekal bela diri untuk melindungi dirinya dari bermacam gangguan kejahatan dan atraksi tersebut di selingi dengan permaian Drumband agar lebih menarik .
2. Penjelasan singkat tentang pentingnya ketenteraman dan ketrtiban umum dalam kehidupan sehari hari.
3. Pengenalan Peraturan daerah yang di kemas melalui permainan dan Tanya jawab tebak perda dengan di iringi dengan music drumband serta hadiah hiburan sebagai stimulus kepada Siswa peserta Sparco.

**A. Gambar kegiatan SPARCO di jenjang Sekolah Dasar**



**B. Gambar kegiatan SPARCO di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**



Anggaran Inovasi SPARCO ini di ambil dari Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah bupati/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dengan memanfaatkan Sarana prasarana yang tersedia seperti Drumband, laptop dan mengambil anggaran dari sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Rincian Realisasi dan Capaian Kegiatan Sebagai berikut:

Dengan Realisasi Kinerja Sebanyak 500 Orang Peserta dari Target Kinerja Sebanyak 500 Orang dengan Capaian 100%, realisasi Keuangan sebesar Rp.46.200.000,- dari target kinerja sebesar Rp.46.800.000,- dengan capaian 98,72% dengan efisiensi Anggaran sebesar Rp 400.000,-

### **3. TRECKK (Tim Reaksi Cepat Ketenetraman dan Ketertiban Umum)**

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan membentuk Tim Reaksi Cepat ini dengan tujuan perluasan jangkauan Pelayanan dengan cepat dan mudah menjangkau lokasi terjadinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka peningkatan Layanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan.

Tugas dari Tim Reaksi Cepat (Treckk) ini adalah melakukan Operasional penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perluasan pemantauan keamanan dan ketertiban umum masyarakat secara menyeluruh ke semua Kecamatan dan Desa yang ada di kabupaten Balangan.

Tim Reaksi Cepat Ketenetaraman dan ketertiban umum ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Anggota satlinmas desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menjaga keaman dan ketertiban di libgkungan masyarakat kabupaten Balangan.

Keberadaan anggota Treckk ini di sambut baik Oleh Masyarakat, dan sangat di apresiasi oleh seluruh camat yang ada di kabupaten Balangan dengan memrintahkan Desa dan Kelurahan untuk membangun Sinergisitas dengan Anggota satlinmas desa dan kelurahan demi terciptanya kabupaten Balangan yang aman dan nyaman dan tenteram , tentunya menarik untuk di kunjungi sehingga menarik Investor untuk masuk ke kabupaten Balangan dan UMKM yang ada di kabupaten Balangan juga akan semakin maju dan Pariwisata di kabupaten Balangan akan menjadi tujuan Wisata yang di perhitungkan .



Sebagian dari Kegiatan Tim Reaksi Cepat Keteneteraman dan Ketertiban umum dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1. Penyisiran Lokasi di Indikasi di jadikan tempat Asusila**



**Gambar 2.1. Penyisiran Lokasi di Indikasi tempat Minum Minuman Keras**



#### 4. Penghargaan

Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh Penghargaan atas Capaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan memperoleh nilai 83,60 dengan Kategori Tinggi dan menempati urutan peringkat Pertama Tingkat Kabupaten Balangan

Piagam Penghargaan tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Dipindai dengan CamScanner

# BAB IV

# PENUTUP

01

KESIMPULAN

02

RENCANA TINDAK  
LANJUT



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di jelaskan bahwa sasaran strategis yang hendak di capai adalah 1.) Menurunya Pelanggaran Perda, 2). Menurunya Gangguan Trantibum dengan Indikator :

1. Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti dengan target 100%
2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum dengan target 10%

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 menunjukkan hasil yang Sangat Baik, Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu:

- a. Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti sebanyak 20 Kasus pelanggaran Perda dan di tindaklanjuti sebanyak 20 kasus pelanggaran Perda dengan Capaian 100% dari Target Kinerja sebanyak 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 2023 terdapat temuan kasus gangguan Trantibum sebanyak 60 Kasus dari Target Tahun (n-1) sebanyak 66 Kasus dengan capaian Penurunan sebanyak 10% dari Target Kinerja sebanyak 10% dengan capaian 100%.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.269.470.329,- yang terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp. 11.762.464.429,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.507.005.900,- dan sesudah perubahan Anggaran berubah menjadi Rp. 17.530.914.109 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 13.114.516.649 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.416.397.460 dengan penambahan sebesar Rp. 3.261.443.780,- Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir 31 Desember 2023 realisasi keuangan sebesar Rp. 16.564.936.177 (94,49) yang terdiri dari belanja Langsung sebesar Rp 12.447.201.717 (94,91) dan belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.117.734.460 (93,24%).

Pencapaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 berdasarkan IKU yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyelesaian terhadap Perda dan Perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif serta melaksanakan rapat koordinasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

dengan instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Serta pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang rutin di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang menyeluruh sampai kepada tingkat kecamatan yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, serta keberadaan Tim Reaksi Cepat Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) yang Siaga 1x24 Jam, serta layanan Pengaduan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terbuka 1x 24 jam baik secara langsung ataupun secara online, di samping itu penerapan sosialisasi yang merata ke seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Balangan juga sangat berperan penting dalam menurunkan pelanggaran perda dan perkada yang ada di Kabupaten Balangan.

Namun demikian, disatu sisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga memiliki hambatan dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal, yaitu

1. Kurangnya Sarana Prasarana Penunjang Ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kurangnya SDM Satpol PP yang bersertifikasi Kompetensi PPNS
3. Masih rendahnya pengetahuan Anggota Satlinmas Desa dalam tehnik penanganan

Trantibum.

- (1) kurangnya sumber daya aparatur Satpol

Pada tahun mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

## **B. Tindak Lanjut**

Beranjak dari analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan di atas, maka diperlukan upaya merumuskan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat di dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan Sosialisasi tentang Perda dan Perkada secara menyeluruh
2. Meningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan melalui pendidikan dan pelatihan formal; dan pembinaan fisik dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

3. Melakukan koordinasi secara intensif bersama instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mensinergikan Penegakan Perda dan Perkada dengan instansi terkait.
4. Memberdayakan Anggota Satlinmas desa dan Kelurahan sebagai tenaga bantu dalam menciptakan ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Balangan yang representatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi ini sangat penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada Rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Balangan.

Paringin, 31 Desember 2023



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 01** STRUKTUR ORGANISASI

**LAMPIRAN 02** CASCADING/POHON KINERJA

**LAMPIRAN 03** MATRIKS TINDAK LANJUT EVALUASI LHE SAKIP TAHUN 2022

**LAMPIRAN 04** PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**LAMPIRAN 05** PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2023

**KEPALA**  
 NOOR ASPARIAH, SP.MP  
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
 NIP. 196606131998022003

**POKJAFUNG**


**SEKRETARIS**  
 ARNI, S.Ag. MM  
 PEMBINA TK I (IV/B)  
 NIP. 196812131989111002

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**  
 MILA HAYATI, S.Pd  
 PENATA (III/C)  
 NIP. 198008032008012027

**SUB BAGIAN KEUANGAN**  
 BAMBANG WIJONARNO, S.Sos  
 PENATA TK I (III/D)  
 NIP. 198103262010011007

**SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN**  
 MUSTAFA FAHMI, S.Kom  
 PENATA (III/C)  
 NIP. 198506112010011015

**BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**  
 FAISAL NOORHADI, ST  
 PEMBINA (IV/A)  
 NIP. 198303022008031001

**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
 HEDY MULYAWAN, M.Pd  
 PEMBINA (IV/A)  
 NIP. 196812051990021001

**BIDANG SUMBER DAYA APARATUR**  
 SYAIFULLAH, SP  
 PEMBINA (IV/A)  
 NIP. 197110172001121001

**BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 LUTHFIYADI, S.Sos  
 PEMBINA (IV/A)  
 NIP. 196706162007011036

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 FERDY SYAFIYAWAN, SH., MM  
 PENATA TK I (III/D)  
 NIP. 198310072010011018

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 ANSARI ASTHAMI, A.Md  
 PENATA (III/C)  
 NIP. 198612212009041001

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 HERLINA AMIANI, S.Sos, MM  
 PENATA TK I (III/D)  
 NIP. 198307132010012015

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 SYAMSUDDINNOOR, A.Md  
 PENATA TK I (III/D)  
 NIP. 197209251993031005

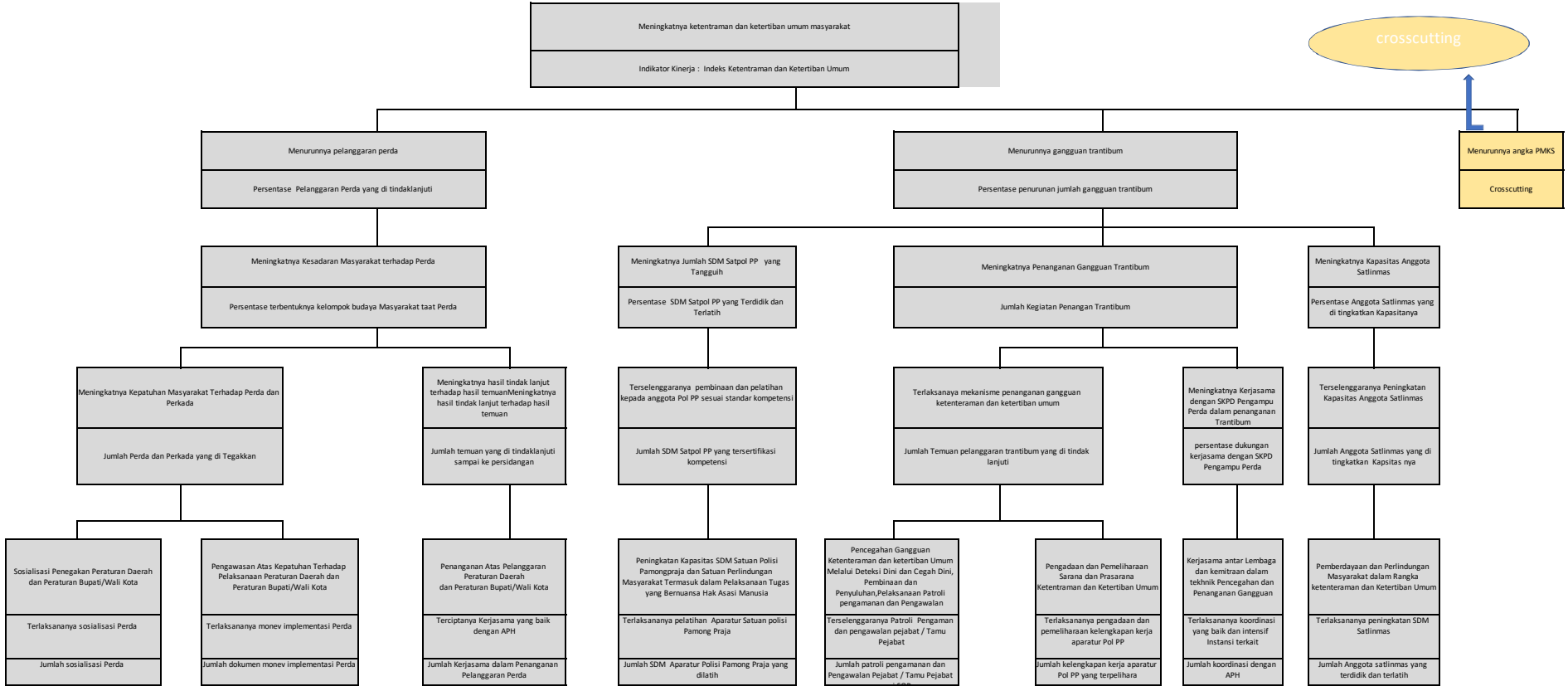
**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**

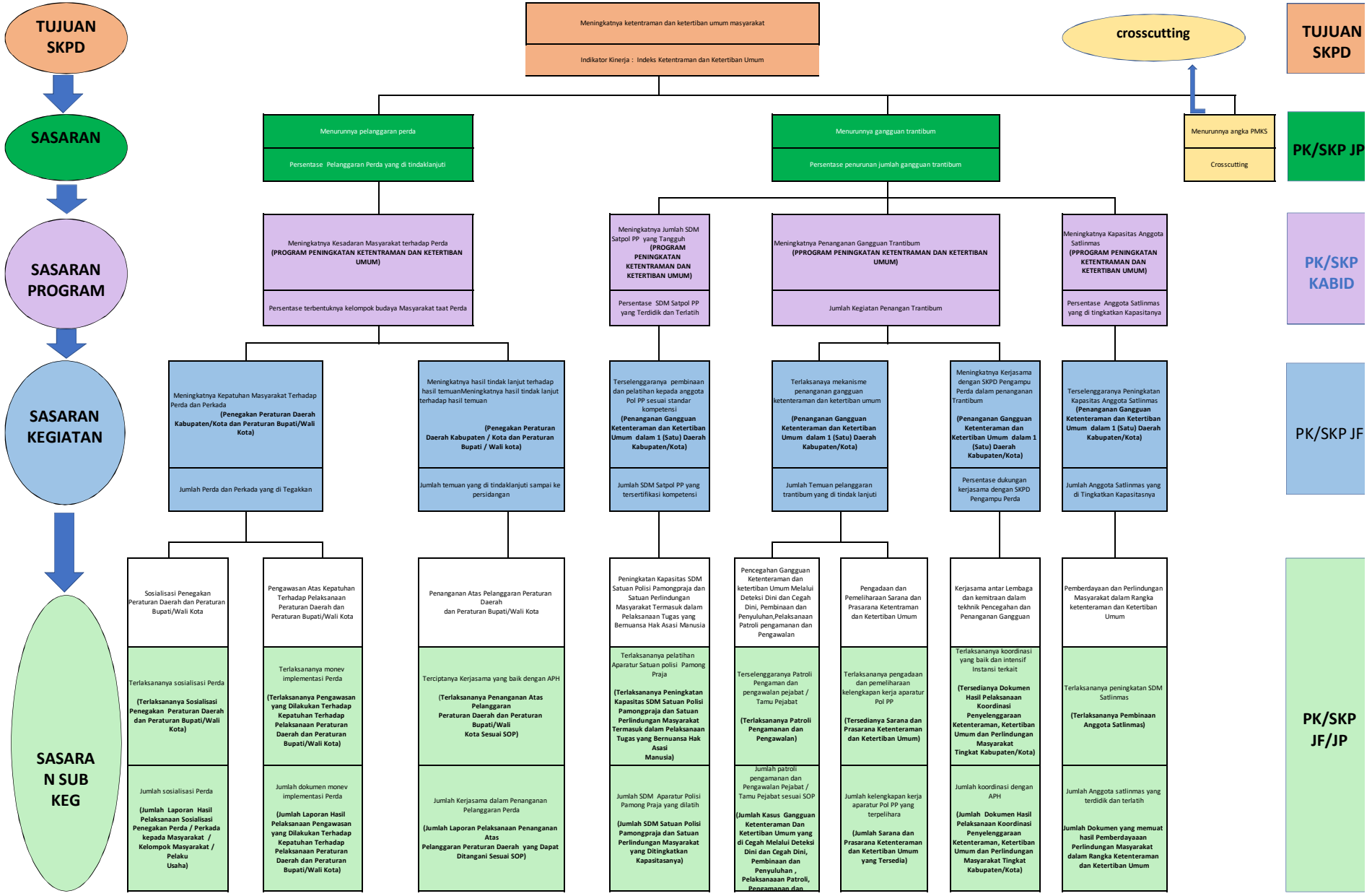
**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 IRHAM MAHFUZ, S.Sos  
 PENATA (III/C)  
 NIP. 196903172006041007

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**

**JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA**  
 SARKANI, S.Pd  
 PEMBINA (IV/A)  
 NIP. 197608152006041017

UPT





**TUJUAN SKPD**

**PK/SKP JP**

**PK/SKP KABID**

**PK/SKP JF**

**PK/SKP JF/JP**



## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Jabatan : BUPATI BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

  
Pihak Kedua  
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

  
Pihak Pertama,  
NOOR ASPARIAH, SP. MP  
NIP.19660613 199802 2 003



LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menurunya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%	100%	-
	Menurunya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Trantibum	10%	10%	-

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6,405,330,000	Rp. 7,574,102,560	Bertambah
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp. 7,864,140,329	Rp. 9,956,811,549	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp . 14,269,470,329</b>	<b>Rp. 17,530,914,109</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023


  
**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**


  
**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Penegakkan Perundang Undangan Daerah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 27 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**

**Pihak Pertama,**

**HEDY MULYAWAN, M.Pd**  
**NIP. 19681205 199002 1 001**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.479.594.000	Rp. 6.524.484.760	Bertambah

Paringin, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua



**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



**HEDY MULYAWAN, M.Pd**  
NIP. 19681205 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PERATURAN PERUNDANG  
UNDANGAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL NOORHADI,ST

Jabatan : Kepala Bidang Peraturan Perundang Undangan Daerah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin,03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**

**Pihak Pertama,**

**FAISAL NOORHADI, ST**  
**NIP. 19830302 200803 1 001**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PENEGAKKAN  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perda	Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	50%	50%	-

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 468,560,000	Rp 551,641,800	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 468,560,000</b>	<b>Rp. 551,641,800</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**



**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
NIP.19660613 199802 2 003

**Pihak Pertama,**



**FAISAL NOORHADI, ST**  
NIP. 19830302 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 27 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**

**Pihak Pertama,**

**LUTHFIYADI, S.Sos**  
**NIP. 19670616 200701 1 036**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	-

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 457,176,000	Rp. 497,976,000	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 457,176,000</b>	<b>Rp. 497,976,000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 27 Oktober 2023

**Pihak Kedua**



**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
NIP.19660613 199802 2 003

**Pihak Pertama,**



**LUTHFIYADI, S.Sos**  
NIP. 19670616 200701 1 036



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SEKRETARIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**

**Pihak Pertama,**

**ARNI, S.Ag. MM**  
**NIP. 19681213 198911 1 002**



LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SEKRETARIS**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,40	72,40	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 186,606,400	Rp. 232,838,000	Bertambah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5,769,424,429	Rp. 6,535,809,949	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 675,064,600	Rp. 1,277,584,600	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 357,047,700	Rp. 426,513,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 353,767,400	Rp. 887,164,800	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 134,814,700	Rp. 134,814,700	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 387,415,100	Rp. 462,086,500	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7,864,140,329</b>	<b>Rp. 9,956,811,549</b>	

Paringin, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua



**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



**ARNI, S.Ag. MM**  
NIP. 19681213 198911 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG SUMBER DAYA  
APARATUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAIFULLAH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
**NIP.19660613 199802 2 003**

**Pihak Pertama,**

**SYAIFULLAH, SP**  
**NIP. 19711017 200112 1 001**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG SUMBERDAYA APARATUR**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Jumlah SDM Satpol PP yang Tangguh	Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	75%	75%	-

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 675,064,600	Rp 1,277,584,600	<b>Bertambah</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 675,064,600</b>	<b>Rp 1,277,584,600</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**



**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
NIP.19660613 199802 2 003

**Pihak Pertama,**



**SYAIFULLAH, SP**  
NIP. 19711017 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG PERENCANAAN DAN  
PELAPORAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MILA HAYATI,S.Pd

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin,03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**ARNI, S. Ag. MM**

**NIP. 19681213 198911 1 002**

**Pihak Pertama,**

**MILA HAYATI, S.Pd**

**NIP. 19800803 200801 2 027**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 116,654,400	Rp 130,734,400	Bertambah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 20,671,200	Rp. 35,765,200	Bertambah
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 49,280,800	Rp . 66,338,400	Bertambah
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 186,606,400</b>	<b>Rp. 232,838,000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua



**ARNI, S.Ag. MM**

NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,



**MILA HAYATI, S.Pd**

NIP. 19800803 200801 2 027



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG WIJONARKO, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**ARNI, S.Ag. MM**  
NIP. 19681213 198911 1 002

**Pihak Pertama,**

**BAMBANG WIJONARKO, S.Sos**  
NIP. 19810326 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG KEUANGAN**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	-
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5,769,424,429	Rp. 6,535,809,949	Bertambah
2.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Rp.125,000,000	Bertambah
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 353,767,400	Rp. 762,164,800	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.123.191.829</b>	<b>Rp. 7.422.974.749</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua



**ARNI, S.Ag. MM**  
NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,



**BAMBANG WIJONARKO, S.Sos**  
NIP. 19810326 201001 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSTAFA FAHMI, S. Kom

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Pd. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**ARNI, S.Ag. MM**  
NIP. 19681213 198911 1 002

**Pihak Pertama,**

**MUSTAFA FAHMI, S.Kom**  
NIP. 19850611 201001 1 005



LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	
<b>2</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	100%	
<b>3</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 53.880.600	Rp. 61.834.300	Bertambah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 21.547.100	Rp. 21.608.700	Bertambah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 8.580.000	Rp. 8.580.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 273.040.000	Rp. 334.490.000	Bertambah
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 134.814.700	Rp. 134,814,700	-
<b>3</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Rp. 372.315.100	Rp. 446.986.500	Bertambah

Kendaraan Dinas  
Jabatan

- 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 15.100.000 Rp. 15.100.000

**JUMLAH Rp. 879.277.500 Rp. 1.032.414.200 Bertambah**

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**



**ARNI, S.Ag. MM**  
NIP. 19681213 198911 1 002

**Pihak Pertama,**



**MUSTAFA FAHMI, S.Kom**  
NIP. 19850611 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG  
TRANTIBUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM MAHFUZ, S. Sos

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

**HEDY MULYAWAN, S.Pd**  
NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama,

**IRHAM MAHFUZ, S.Sos**  
NIP. 19690317 200604 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Dukungan Kerjasama SKPD Pengampu Perda dalam enanganan Trantibum	persentase dukungan kerjasama KPD engampu Perda	70%	70%	-

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Rp. 70.000.000	Rp. 151.545.000	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 70.000.000</b>	<b>Rp. 151.545.000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua



**HEDY MULYAWAN, S.Pd**  
NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama,



**IRHAM MAHEUZ, S.Sos**  
NIP. 19690317 200604 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG  
TRANTIBUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANSARI ASTAMI,A.Md

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTHFIYADI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin,27 Oktober 2023

Pihak Kedua

**HEDY MULYAWAN, M.Pd**  
NIP. 18681205 199002 1 001

Pihak Pertama,

**ANSARI ASTAMI, A.Md**  
NIP. 19861221 200904 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	60 Kasus	60 Kasus	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan	Rp. 4.981.594.000	Rp. 5.938.939.760	<b>Bertambah</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.981.594.000</b>	<b>Rp. 5.938.939.760</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua



**HEDY MULYAWAN, M.Pd**  
NIP. 18681205 199002 1 001

Pihak Pertama,



**ANSARI ASTAMI, A.Md**  
NIP. 19861221 200904 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG LINMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUDINNOOR,A.Md

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin,27 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**LUTHFIYADI,S.Sos**  
NIP. 19670616 200701 1 036

**Pihak Pertama,**

**SYAMSUDINNOOR, A.Md**  
NIP. 19720925 199303 1 005

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang	2355 Orang	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 457,176,000	Rp. 497,976,000	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 457,176,000</b>	<b>Rp. 497,976,000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua



**LUTHFIYADI, S.Sos**  
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,



**SYAMSUDINNOOR, A.Md**  
NIP. 19720925 199303 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERDY SYAFTIAWAN, SH

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI,ST

Jabatan : Kepala Bidang Peraturan Perundang undangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**FAISAL NOORHADI,ST**  
NIP. 19830302 200803 1 001

**Pihak Pertama,**

**FERDY SYAFTIAWAN,SH**  
NIP. 19831007 201001 1 018

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	24 Perda	24 Perda	-
2	Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	10 Pelanggaran	10 Pelanggaran	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Rp. 56,340,000	Rp. 119,551,800	Bertambah
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 412,220,000	Rp. 432,090,000	Bertambah
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 468.560.000</b>	<b>Rp. 551.641.800</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua

  
**FAISAL NOORHADI,ST**  
 NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama,

  
**FERDY SYAFTIAWAN,SH**  
 NIP. 19831007 201001 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG  
SUMBER DAYA APARATUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERLINA AMIANI,S.Sos,MM

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**SYAIFULLAH,SP**  
**NIP. 19711017 200112 1 001**

**Pihak Pertama,**

**HERLINA AMIANI,S.Sos, MM**  
**NIP. 19830713 201001 2 015**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA**

<b>NO</b>	<b>KINERJA (SASARAN)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH ATAU BERKURANG</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan kepada anggota Pol PP sesuai standar kompetensi	Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20 Orang	20 Orang	-

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 605,014,600	Rp. 701,534,600	Bertambah
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 70.050.000	Rp. 576.050.000	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 675.064.600</b>	<b>Rp. 1.277.050.000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

**Pihak Kedua**



**SYAIFULLAH, SP**  
NIP. 19711017 200112 1 001

**Pihak Pertama,**



**HERLINA AMIANI, S.Sos, MM**  
NIP. 19830713 201001 2 015



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARKANI,S.Pd

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 27 Oktober 2023

**Pihak Kedua**

**LUTHFIYADI,S.Sos**  
NIP. 19670616 200701 1 036

**Pihak Pertama,**

**SARKANI,S.Pd**  
NIP. 19760815 200604 2 017

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang	2355 Orang	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 457.176.000	Rp. 497.976.000	Bertambah
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 457.176.000</b>	<b>Rp. 497.976.000</b>	<b>Bertambah</b>

Paringin, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua



**LUTHFIYADI, S.Sos**  
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,



**SARKANI, S.Pd**  
NIP. 19760815 200604 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

# Piagam Penghargaan

Nomor : 800/76/PSD/MI-BLG/2023

Peringkat 1

Diberikan Kepada :

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Atas capaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan nilai **83,60** dalam kategori **TINGGI**.

Parangin, 29 November 2023

Bupati Balangan,



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom